

## **Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat-Obatan (Studi Pada Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan)**

**Ishak Awaluddin<sup>1</sup>, Yuli Lestari Labangu<sup>2</sup>, Firdayanti<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo

*Email: Firdayanti77@gmail.com*

### ***Abstrak***

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal persediaan obat-obatan pada Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan sudah efektif karena telah menerapkan komponen lingkungan pengendalian internal yang dinilai berdasarkan *COSO Internal Control Framework*. Pertama, Lingkungan pengendalian telah diterapkan dengan baik dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan persediaan obat-obatannya. Kedua, Penilaian risiko sudah cukup baik dengan melakukan *stock opname* secara periodik setiap bulan. Ketiga, Aktivitas pengendalian sudah cukup baik terlihat dari penggunaan nomor urut tercetak pada dokumen LPLPO, SBBK, dan dokumen *stock opname*. Keempat, Informasi dan komunikasi sudah baik dengan adanya sistem manual dan komputerisasi. Dan kelima, Pemantauan sudah baik dengan melakukan *stock opname* secara periodik setiap bulan.

**Kata kunci : COSO; Obat-Obatan; Sistem Pengendalian Internal**

### ***Abstract***

The purpose of this research is to determine the implementation of the internal control system at the Tiworo Islands District Health Center. This research uses a descriptive qualitative approach method with data collection methods, interview techniques and documentation. The research results show that the implementation of the internal control system for medicine supplies at the Tiworo Islands District Health Center is effective because it has implemented internal control environment components which are assessed based on the COSO Internal Control Framework. First, the control environment has been implemented well by implementing Standard Operating Procedures (SOP) in managing medicine supplies. Second, the risk assessment is quite good by carrying out stock taking periodically every month. Third, control activities are quite good, as can be seen from the use of serial numbers printed on LPLPO, SBBK documents and stock taking documents. Fourth, information and communication are good with manual and computerized systems. And fifth, monitoring is good by carrying out stock taking periodically every month.

**Keywords: COSO; Medicinal; Internal Control System**

## **1. PENDAHULUAN**

Sistem pengolahan data dan sistem informasi pada suatu entitas saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai bidang kegiatan, salah satunya dalam pencatatan dan pengelolaan persediaan barang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yaitu salah satunya Puskesmas.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Najiyah dkk., 2020). Persediaan mempunyai resiko sangat rentan terhadap kerusakan maupun pencurian. Oleh karena itu agar dapat terorganisir dengan baik, setiap perusahaan harus memiliki sistem yang memadai untuk mengolah data persediaan agar tidak terjadi penyelewengan maupun kekurangan persediaan serta informasi mengenai persediaan dapat dipercaya. Pencatatan dan pengelolaan persediaan akan lebih efektif apabila didukung dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Pengendalian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar.

Puskesmas Tiworo Kepulauan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dituntut untuk menghadapi tekanan agar lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas apa yang dilakukan. Aktifitas utama dari Puskesmas Tipe adalah memberikan pelayanan dan perawatan. Namun pelayanan tersebut tidak akan maksimal jika persediaan di puskesmas tersebut tidak lengkap. Persediaan obat-obatan di puskesmas sangat penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan suatu puskesmas sehingga dengan tersedianya persediaan obat-obatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa puskesmas dalam hal ini pasien.

Puskesmas Tiworo Kepulauan saat ini merupakan satu-satunya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yaitu, instalasi rawat inap dan rawat jalan di wilayah Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat. Persediaan obat-obatan di distribusikan ke pasien baik pasien umum maupun BPJS. Pengadaan obat dilakukan apabila Depo Farmasi/bagian Instalasi Farmasi memerlukan obat yang tidak dimiliki atau stok obat yang terdapat digudang habis (Milawati,2021)

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan bahwa permasalahan yang muncul yaitu pengelolaan persediaan obat-obatan saat ini masih menggunakan pembukuan secara manual dan belum terkomputerisasi sehingga kegiatan yang meliputi aspek seleksi dan perumusan kebutuhan serta pengadaan kebutuhan obat menjadi kurang tepat, kurang efektif dan kurang efisien. Sehingga hal ini menyebabkan proses pencatatan tentang obat yang terpakai dan obat yang dibutuhkan pada periode berikutnya untuk disampaikan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan menjadi sering terlambat. Hal ini disebabkan karena pencatatan ke dalam buku masih dalam bentuk kertas-kertas resep yang tidak diarsipkan dengan benar sehingga kesulitan dalam pengarsipan dan pencarian data obat. Dengan demikian permasalahan yang timbul saat ini dikhawatirkan dapat beresikiko pada kurangnya persediaan stok obat yang ada atau stok obat yang ada di gudang habis. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan operasional Puskesmas. Untuk menangani resiko tersebut maka Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan harus memiliki sistem pengendalian internal

yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengendalian internal atas persediaan obat-obatan pada Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pengendalian internal atas persediaan obat-obatan pada Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan.

## 2. LANDASAN TEORI

Menurut Kristanto (2018) sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (*input*) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan. Demikian halnya menurut O'Brien dan Marakas (2018) dalam buku Husda dan Wangdra (2016:90) menjelaskan definisi sistem yang diterjemahkan yaitu sistem merupakan sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki batasan yang telah didefinisikan dengan jelas, bekerja sama untuk mencapai seperangkat tujuan, dengan cara menerima berbagai input untuk kemudian diolah dengan cara mengubahnya dalam bentuk yang lain sebagai output yang dihasilkan).

Menurut (Maruf dkk., 2019) pengendalian internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Pada bukunya Committee of Sponsoring Organization (COSO) (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut: "Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance". Pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direktur, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) (2013) ada 5 unsur pokok (komponen) pengendalian internal yang saling berkaitan: Pertama, Lingkungan pengendalian, tanpa lingkungan pengendalian yang efektif maka keempat komponen lainnya mungkin tidak menghasilkan pengendalian internal yang efektif. Auditor perlu mempertimbangkan subkomponen dari lingkungan pengendalian untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, yaitu: (a) Integritas dan nilai-nilai etis meliputi tindakan manajemen untuk mencegah karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis, (b) Komitmen pada kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang persyaratan kompetensi yang harus dipatuhi bagi pekerjaan tertentu. Subkomponen selanjutnya (c) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit, dewan komisaris mewakili pemegang saham dalam mengawasi jalannya kegiatan entitas yang dilakukan atau dikelola manajemen, kemudian (d) Filosofi dan gaya operasi manajemen, manajemen melalui prinsip dan sikapnya, memberikan isyarat tertentu bagi para karyawannya mengenai arti penting pengendalian internal, (e) Struktur organisasi menunjukkan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam setiap individu atau bagian dan terakhir (f) Kebijakan perihal sumber daya manusia (karyawan entitas), Karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat merusak sistem, meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan. Kedua, Penilaian Resiko, merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketiga, Aktivitas

pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur ini terdiri atas : (a) Pemisahan tugas, meliputi pemisahan fungsi atau pembagian kerja, ( b) Otorisasi yang tepat atas transaksi, agar pengendalian berjalan dengan baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat, c) Dokumen dan catatan yang memadai, dokumen dan catatan merupakan objek fisik dimana transaksi akan dicantumkan serta diiktisarkan. (d) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, aktiva dan catatan harus dilindungi, subkomponen yang terakhir (e)Pemeriksaan independen atau verifikasi internal, kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Keempat, Informasi dan Komunikasi adalah sistem informasi dan komunikasi akuntansi yang bertujuan agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi. Kelima, Pemantauan, aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2014) PSAK No.14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa(Maruf dkk., 2019). Menurut PSAP 05 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Najiyah dkk., 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat. Obyek penelitian ini adalah analisis sistem pengendalian internal atas persediaan obat-obatan pada Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar (Sugiyono, 2017). Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka dan berbentuk uraian atau penjelasan (Maruf dkk., 2019). Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi, sejarah singkat berdirinya Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan, letak geografis obyek, visi dan misi, struktur organisasi dan lain sebagainya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa gambaran umum Puskesmas, prosedur-prosedur pengelolaan persediaan serta penerapan pengendalian internal atas persediaan obat di Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan. Sedangkan data sekunder berupa dokumen surat pesanan, faktur pembelian, kwitansi pembayaran, kartu stok serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) ada empat hal utama dalam proses analisis data yang dilakukan diantaranya: Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusions and verification*).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pengelolaan persediaan obat-obatan yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan terdiri dari beberapa prosedur yaitu proses pembelian (pengadaan) obat-obatan, proses penyimpanan obat-obatan, proses pengeluaran obat-obatan, proses pelabelan dan penggunaan obat dan proses pengendalian dan pelaporan obat.

Pencatatan persediaan obat-obatan Puskesmas Tiworo Kepulauan menggunakan metode mutasi persediaan/ perpetual (Perpetual Inventory Method), dimana pencatatan terhadap persediaan obat-obatan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sedangkan penggunaan persediaan obat-obatan disesuaikan dengan tanggal kadaluarsa obat. Pencatatan dan pembuatan laporan di Puskesmas Tiworo Kepulauan dilakukan dengan manual (menggunakan kertas dan pena) dan modern (menggunakan komputer/laptop).

Penyediaan persediaan obat-obatan Puskesmas Tiworo Kepulauan yaitu melalui Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Dinas Kesehatan Kab/Kota Muna Barat dan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penyediaan persediaan obat-obatan umumnya dilakukan melalui IFK. Penyediaan obat melalui Dana BPJS dilakukan ketika persediaan obat dari IFK belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Permintaan persediaan obat-obatan ke IFK tidak disesuaikan dengan tingkat pemakaian obat tetapi tingkat kecukupan obat di Puskesmas.

Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan persediaan obat pada Puskesmas Kecamatan Tiworo Kepulauan yaitu :Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Muna Barat, Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), Ruang penyimpanan farmasi puskesmas Tikep, Sub unit pelayanan kesehatan dilingkungan Puskesmas Tikep. Dokumen-dokumen yang terkait dalam pengelolaan persediaan obat-obatan pada Puskesmas Tikep yaitu : Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat,Bukti transaksi antara pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ,Dokumen stock opname , Bukti permintaan obat dari sub unit pelayanan, Neraca Obat. Pengadaan atau pemesanan obat diajukan oleh pengelola obat di Puskesmas yang disetujui oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas kesehatan Kab/Kota dengan menggunakan format LPLPO. Sumber penyediaan obat di Puskesmas berasal dari Dinas Kesehatan Kab/kota. Dengan adanya permenkes No. 19 Tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memungkinkan Puskesmas untuk melakukan pengelolaan obat sendiri dengan dana JKN tersebut.

Alur pemesanan obat dari Puskesmas ke IFK yaitu sebagai berikut :

1. Permintaan rutin yaitu permintaan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan dimana pada Puskesmas Tikep melakukan permintaan rutin tiap 3 bulan sekali.
2. Permintaan khusus yaitu dilakukan diluar jadwal yang telah disepakati apabila terjadi peningkatan yang menyebabkan kekosongan obat dan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta obat rusak.

Setiap penyerahan obat oleh IFK kepada Puskesmas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang dibuat wewenang untuk hal tersebut. Petugas penerima obat wajib melakukan pengecekan terhadap obat-obatan yang diterima dengan mengecek jumlah kemasan ,jenis dan jumlah obat, bentuk obat sesuai dengan LPLPO dan ditanda tangani oleh petugas penerima diketahui oleh Kepala Puskesmas. Pelaksanaan fungsi pengendalian distribusi obat kepada sub unit kesehatan lainnya merupakan tanggung jawab kepala puskesmas. Setelah pengecekan obat dilakukan maka dilakukan penyimpanan di Gudang Obat Puskesmas, penyimpanan obat dilakukan dengan cara disusun menggunakan metode FEFO (*First Expired First Out*). Obat-obatan disimpan

pada rak, obat cairan dipisahkan dari obat yang padat, serta vaksin/serum disimpan di lemari pendingin.

Pelabelan obat adalah kegiatan pemberian etiket pada obat yang di dalamnya tertulis tanggal berobat, nama pasien, frekuensi pemakaian, cara pakai dan waktu penggunaan. Prosedurnya yaitu : Pertama, Pasien membawa resep ke kamar obat. Kedua Petugas obat melakukan skринning resep: (a) Memeriksa kelengkapan administrasi resep (nama dokter, SIP dokter, tanggal, nama obat, aturan pakai, nama pasien, umur, berat badan, jenis kelamin, dan alamat/nomor telpon pasien). (b) Pemeriksaan farmasetik. (c) Pertimbangan klinik dan formulir informasi obat dengan catatan dokter. (d) Petugas obat menyiapkan obat yang diminta di resep, dengan memberikan pelabelan pada obat: Label/etiket putih untuk obat dalam, Label/etiket biru untuk obat luar. (e) Sebelum menyerahkan obat kepada pasien, petugas obat mengecek kembali obat apakah sudah sesuai dengan resep yang diminta. (f) Petugas obat mencatat pengeluaran obat ke dalam Kartu Stok Obat Apotek. Prosedur pemberian informasi penggunaan obat kepada pasien yaitu : Pertama, Petugas obat memberikan informasi obat kepada pasien berupa frekuensi pemakaian, cara pakai, waktu penggunaan serta efek samping yang ditimbulkan. Kedua, Petugas obat menjawab pasien dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas. Terakhir, Petugas obat memastikan pasien telah memahami cara penggunaan obat.

Pendistribusian obat dilakukan oleh Gudang Puskesmas dengan cara menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan. Pengambilan obat dilakukan oleh sub unit pelayanan dan penyerahan obat harus disertai dengan dokumen penyerahan LPLPO sub unit. Penyaluran atau pendistribusian adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas antara lain : Apotek, Puskesmas pembantu, Polindes, Posyandu.

Pengendalian obat adalah kegiatan untuk memastikan penggunaan obat sesuai dengan formularium, diagnosis dan terapi serta memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan juga kekosongan atau kekurangan, kerusakan, kadaluwarsa dan kehilangan serta pengembalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2014). Sedangkan pelaporan obat adalah proses membuat dan mengirimkan laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan obat, yaitu tentang penerimaan dan pemakaiannya.

### **Pembahasan**

Sistem pengendalian internal meliputi struktur Puskesmas, metode dan berbagai ukuran yang dikordinasikan untuk bisa menjaga harta kekayaan puskesmas, memeriksa ketelitian dan juga keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan Puskesmas. Struktur pengendalian internal menyediakan sarana melalui adanya proses pengendalian internal. Apabila Puskesmas mampu menerapkan SPI yang tepat maka seluruh operasional, sumber daya fisik dan data akan bisa dipantau dan dikendalikan dengan baik agar mudah dikendalikan. Sehingga tujuan Puskesmas akan lebih mudah tercapai dan berbagai resiko akan bisa diminimalisir dengan baik dengan adanya hasil informasi yang lebih terpercaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka komponen sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Puskesmas Tiworo Kepulauan : Pertama, Lingkungan pengendalian, lingkungan pengendalian persediaan obat pada Puskesmas Tipek sangat penting karena merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang dibangun dalam entitas dan dapat mempengaruhi efektifitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian yang baik dinilai berdasarkan indikator berikut : (a) Integritas dan nilai etika, dalam penegakan integritas dan nilai etik pada instalasi farmasi puskesmas Tiworo Kepulauan masih menggunakan kode perilaku dari profesi masing-masing. Puskesmas Tiworo Kepulauan sendiri belum menyusun standar perilaku secara

formal sehingga ada kemungkinan aturan atau kebijakan yang disampaikan tidak terlaksana dengan efektif. (b) Komitmen terhadap Kompetensi, komitmen terhadap kompetensi mengharuskan pihak Puskesmas Tipek untuk mempertimbangkan tingkat kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan terkait persediaan obat. Hal ini telah diterapkan khususnya pada bagian kefarmasian dimana kepala gudang adalah seorang Apoteker sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik begitupun juga yang menjadi Asisten Apoteker. (c) Struktur Organisasi, Puskesmas Tiworo Kepulauan memiliki beberapa fungsi terkait, diantaranya adalah fungsi Kamar Obat/Apotek dan fungsi Gudang. Dalam pengelolaan persediaan obat-obatan, fungsi gudang bertugas untuk menerima dan menyimpan persediaan obat-obatan di lemari obat secara *Alphabetis*, kemudian mendistribusikannya ke apotek. Selain itu fungsi gudang juga melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran persediaan obat-obatan dari gudang. Sedangkan fungsi apotek bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta pencatatan atas pendistribusian persediaan obat ke pasien. Kedua, Penilaian risiko pada Puskesmas Tipek dilihat dari petugas kefarmasian telah mengenali dan mempelajari risiko-risiko yang ada serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi risiko agar tidak terjadi kesalahan. Puskesmas Tipek menilai persediaan obat dengan memperhatikan kondisi barang dan masa pemakaiannya untuk itu pihak kefarmasian membuat kebijakan dimana *stock opname* dilakukan secara periodik dan menggunakan metode yaitu FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) untuk menyimpan obat-obatan. Masalah mengenai kehabisan stok obat pihak kefarmasian menggunakan obat lain yang fungsinya serupa baik obat tablet maupun sirup. Komponen ketiga (c) Aktivitas Pengendalian terdiri atas : (a) Pemisahan tugas yang memadai, dalam pemisahan tugas pada Puskesmas Tiworo Kepulauan belum tampak adanya bagian terpisah antara bagian gudang dan bagian akuntansi. Hal ini dinilai kurang efektif karena beban kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab 2 orang hanya ditanggung oleh 1 orang, sehingga dapat meningkatkan terjadinya risiko kelalaian kerja serta pengawasan yang kurang efektif. Pemisahan tugas dan tanggungjawab yang jelas sangat penting demi menjamin keefektifan pengelolaan sekaligus kualitas pengendalian internal persediaan obat-obatan.

(b) Otorisasi yang sesuai antara transaksi dan aktivitas, otorisasi atas transaksi dan aktivitas dilakukan Puskesmas Tipek khususnya bagian kefarmasian dengan melakukan pembubuhan tanda tangan oleh pihak yang berwenang pada dokumen misalnya dokumen Laporan Permintaan dan Lembar Pemakaian Obat untuk Dinkes yang diotorisasi oleh penanggung jawab ruang kefarmasian dan kepala puskesmas yang membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Selain itu, otorisasi juga dilakukan dengan membubuhkan stempel pada bukti transaksi dan juga penulisan nomor surat pada bukti transaksi yang dilakukan oleh pihak yang diberikan wewenang. (c) Dokumen dan catatan yang memadai, Puskesmas Tipek khususnya bagian kefarmasian telah membuat dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang bertujuan untuk pengawasan persediaan seperti dokumen bukti transaksi antara pihak Puskesmas dan Dinkes Kabupaten/Kota, dokumen LPLPO, dokumen *stock opname*, SBBK, dokumen bukti permintaan obat dari sub unit pelayanan. d) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, Puskesmas Tipek telah memiliki Gudang/Ruang Penyimpanan Farmasi yang dilengkapi dengan lemari obat, lemari dokumen, rak-rak obat, lemari pendingin, AC serta meja untuk petugas melakukan aktivitas. Selanjutnya keempat, Informasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh Puskesmas Tipek, dilihat dari pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran barang persediaan yang dilakukan setelah transaksi terjadi, semua persediaan obat telah diberi nomor atau kode secara berurutan, informasi yang telah tersedia tepat waktu dan memungkinkan pemantauan aktivitas. Selain itu dokumen-dokumen penting yang akan dikirimkan ke

Dinas Kesehatan Kota Muna Barat selalu dibuat menjadi dua rangkap untuk mencegah terjadinya penyelewangan, kehilangan maupun kerusakan dokumen. Terakhir yang dilakukan adalah Pemantauan, Puskesmas Tipek melakukan pemantauan khususnya pada bagian kefarmasian dengan melakukan pemantauan persediaan obat dengan melakukan *stock opname* secara periodik setiap bulannya. Puskesmas Tiworo Kepulauan juga menggunakan metode pencatatan perpetual (*perpetual inventory system*) dan kartu stok obat dalam pengelolaan persediaannya.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal persediaan obat pada Puskesmas Tiworo Kepulauan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar komponen sistem pengendalian internal atas persediaan obat-obatan telah dijalankan dan diterapkan dengan baik. Meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti pemisahan tugas antara beberapa bagian khususnya bagian Kefarmasian dan beberapa alat keamanan pada gudang penyimpanan obat yang perlu ditambah guna menambah keamanan persediaan obat-obatan pada Puskesmas Tiworo Kepulauan. Selain itu sistem pengendalian internal persediaan obat-obatan pada Puskesmas Tiworo Kepulauan telah memenuhi seluruh kebutuhan Puskesmas. Meskipun pernah terjadi kekurangan persediaan obat dikarenakan stok obat habis dan kedatangan obat yang terlambat namun hal tersebut cepat diatasi dengan menggunakan pilihan obat yang serupa dan mempunyai fungsi yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N., & Nurhawaeny, E. (2019). Analisis Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit (Studi Empiris pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon). *Jurnal Proaksi*, 6 (1), 1-10. <https://doi.org/10.32354/jpk.v6i1.840>
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (4 ed). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Makikui, L. E., Morasa, J., & Pinatik, S. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Berdasarkan Coso pada Cv. Kombos Tendeand Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1222–1232. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18695.2017>
- Marlina, K., & Dewi, E. P. (2018). Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Toko Bangunan Rajawali Steel Buana Akuntansi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 5(2), 13–25.
- Maruf, Juniarti Melisa, Tinangon, Jantje J., & Walandouw, Stanley Kho. (2019). Analisis Pengendalian Internal atas Persediaan Obat pada Organisasi Sektor Publik di Puskesmas Bahu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3099–3108. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24062>
- Milawati. (2021). *Profil Puskesmas Tiworo Kepulauan*. Puskesmas Tiworo Kepulauan Menteri Kesehatan. (2016). *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Kementerian Kesehatan RI.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Najiyah, R., Eriswanto, E., & Kartini, T. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Persediaan Obat (Studi Kasus di Puskesmas Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi). *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 54–62. <https://doi.org/10.35906/je001.v9i2.574>



- Puspitawati, Lilis. (2021). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Syah Sri & Jim Nurfianti. 2021. Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan (Studi Kasus Pada PT Kebayoran Pharma Cabang Makassar). *Tangible Journal* Vol 6. <https://ojs-stie-tdn.ac.id/index.php/TB>
- Romney, Marshall B. Dan Paul John Steinbart. (2014). *Accounting Information System*. Edisi Ketiga belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kuantitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 3345. <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Ristono, Agus. (2013). Manajemen Persediaan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Grama Ilmu.
- Sudiarto, E., Kurniawan, D., & Djuhari, D. (2021). Makna Pengendalian Internal atas Persediaan Obat-obatan Di Puskesmas Puncu. *Pajak Dan Keuangan Negara*, 3, 112–118.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, R. D. T., Trimurti, & Hendra, K. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Persediaan Obat Di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Surakarta. *Seminar Nasional IENACO*, 656–663.